

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini seluruh data yang diperoleh selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan fokus kajian penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaksana dan sasaran serta studi pustaka terkait fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini akan menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen.

4.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen (Telaah Pasal 7)

4.1.1 Tujuan Penanggulangan HIV-AIDS

Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila pengimplementasian isi kebijakan jelas dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa tujuan dari Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen adalah untuk menaggulangi HIV-AIDS, menekan perkembangan dan penyebaran HIV-AIDS, mengobati orang yang terkena HIV-AIDS, serta mengurangi dampak buruk dari penularan HIV-AIDS itu sendiri. Orang yang sudah terkena HIV-AIDS memang

tidak bisa disembuhkan tetapi tetap diobati agar kondisinya tidak semakin memburuk.

Berdasarkan tujuan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen dari hasil wawancara penanggulangan HIV-AIDS ini belum berjalan maksimal. Peraturan daerah ini ada sejak tahun 2013 tetapi setelah berjalan selama kurang lebih tiga tahun jumlah kasus HIV-AIDS terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen yaitu menekan perkembangan dan penyebaran HIV-AIDS belum tercapai.

4.1.2 Sasaran Program Penanggulangan HIV-AIDS

Dalam program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen sasarannya adalah seluruh masyarakat terutama masyarakat beresiko tinggi. Dalam pelaksanaannya pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memiliki target yang berpedoman pada aksi nasional. Targetnya pada tahun 2020, 9 orang dengan HIV-AIDS (ODHA) ditemukan, 9 orang tersebut diobati, 9 orang yang sudah diobati itu dipertahankan kondisinya agar tidak semakin memburuk. Diharapkan pada tahun 2020 dari perkiraan 1000 lebih ODHA yang ada, 90% ODHA di Kabupaten Kebumen ditemukan. Dari data yang diperoleh sampai dengan tahun 2016 sudah 671 ODHA yang ditemukan dari target 90% dari perkiraan 1000 lebih ODHA ditemukan pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sasaran dari program penanggulangan HIV-AIDS adalah seluruh masyarakat tetapi tujuan program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen belum diketahui oleh sasaran program atau masyarakat. Informasi mengenai program penanggulangan HIV-AIDS belum sampai ke seluruh masyarakat. Sedangkan untuk target jumlah dalam pelaksanaannya masih belum mencapai target yang ditetapkan.

4.1.3 Keterlibatan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen peran pemerintah cukup besar. Dalam hal ini peran pemerintah diwakili oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Berdasarkan hasil wawancara dengan staff KPA, KPA memiliki peran yang penting dalam penanggulangan HIV-AIDS mulai dari pencegahan, pengobatan, rehabilitasi sampai dengan mitigasi dampak. Peran KPA dalam pencegahan adalah memberikan informasi dan edukasi kepada semua masyarakat. KPA juga menentukan instansi mana saja yang terlibat didalamnya. Peran dalam pengobatan yaitu memastikan bahwa ODHA terus mendapat pengobatan. Kegiatan ini tentunya melibatkan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang menangani dan mengerti masalah kesehatan. Peran dalam rehabilitasi yaitu melakukan pendampingan terhadap ODHA. Kegiatan pendampingan ini dilakukan bersama dengan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS). Sedangkan untuk mitigasi dampak yaitu pemberian bantuan kepada ODHA yang bisa berupa modal usaha. Pemberian bantuan ini dari pemerintah melalui Dinas Sosial yang disalurkan melalui KDS.

Sebagai koordinator penanggulangan HIV-AIDS, KPA juga memiliki peran tidak kalah penting. Peran KPA sebagai koordinator antara lain mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kabupaten, mengadakan kerjasama dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS, menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV-AIDS kepada aparat dan masyarakat, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS.

Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV-AIDS yakni sebagai obyek dan subyek. Sebagai obyek masyarakat diposisikan sebagai penerima atau sasaran kebijakan. Masyarakat menjadi obyek kegiatan ketika pemerintah melalui KPA atau dinas terkait memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi serta menjalankan kewajibannya untuk berperilaku hidup sehat. Peran masyarakat sebagai subyek dengan ikut serta sebagai bagian dari Warga Peduli AIDS (WPA). Sebagai bagian dari WPA, masyarakat diharapkan aktif dalam kegiatan pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA serta mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen peran swasta diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peran pihak swasta dalam melaksanakan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen masih belum maksimal. Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS baru dari pihak Lembaga Sadaya Masyarakat (LSM). Keterlibatan LSM seperti Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yang bertugas sebagai pendamping orang dengan HIV-AIDS (ODHA) dan Forum Peduli HIV-AIDS (FPA) Bougenville yang bertugas sebagai penjangkau ODHA. KDS bertugas sebagai pendamping ODHA. Tidak hanya pendampingan saat pengobatan, KDS juga ikut membantu mengusulkan dan menyalurkan bantuan kepada ODHA dari pemerintah. Untuk FPA Bougenville bertugas sebagai penjangkau ODHA. FPA Bougenville ikut terlibat dalam VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) Mobile. VCT Mobile melakukan kegiatan tes HIV-AIDS dengan cara berpindah-pindah tempat. Sedangkan keterlibatan perusahaan swasta sampai saat ini hanya sebatas pemberian ruang atau tempat jika ada kegiatan yang melibatkan karyawannya. Belum ada kerjasama yang mengikat antara swasta dan masyarakat. Kerjasama mereka hanya bersifat situasional saja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat sudah baik. Keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan WPA. Sedangkan keterlibatan swasta masih belum optimal karena kerjasama yang dilakukan sifatnya masih situasional. Masih diperlukan kerjasama lebih lanjut dengan swasta dalam hal ini perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan bisa tercapai.

4.1.4 Kesiapan Masyarakat

Kesiapan masyarakat dilihat dari masyarakat sebagai penerima program dapat memahami dan dapat terlibat dalam program tersebut. Peran masyarakat sangat dibutuhkan guna mensukseskan program. Pada implementasi program Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen masyarakat berperan sebagai sasaran kebijakan. Untuk itu kesiapan masyarakat sangat diperlukan guna mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa kesiapan masyarakat di Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen masih belum siap. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan daerah tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen. Kurangnya pengetahuan masyarakat bisa disebabkan kurang meratanya informasi yang diterima masyarakat terkait kebijakan ini. Sosialisasi yang dilakukan selama ini dirasa masih belum menyentuh seluruh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat. Satu dari tiga informan mengatakan belum pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi. Dua informan lain mengatakan sudah pernah mendapat sosialisasi ketika masih sekolah dan satu informan lain mengatakan sudah pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan di desa tempat tinggalnya. Untuk perda sendiri ketiga informan masih mengatakan kurang tau dan tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa informasi tentang perda belum sampai ke seluruh masyarakat. Ketiga informan juga mengatakan mereka justru mengetahui tentang HIV-AIDS dari internet. Dari hasil temuan ini bisa dikatakan

masyarakat belum siap. Masyarakat dikatakan siap jika mereka mengetahui tugas dan posisi mereka dalam pelaksanaan kebijakan tetapi pada kenyataannya masyarakat belum mengetahui perda penanggulangan HIV-AIDS sehingga mereka tidak mengetahui tugas dan posisi mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Bagaimana masyarakat bisa berperan dalam pelaksanaan kebijakan jika dasarnya saja mereka tidak tahu. Jadi dapat disimpulkan dari segi kesiapan masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan daerah tentang penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen. Sehingga bisa dinilai jika masyarakat masih belum siap

4.1.5 Ketersediaan Layanan Kesehatan

Dalam penanggulangan HIV-AIDS, ketersediaan layanan kesehatan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS disebutkan sebagai langkah-langkah penanganan HIV-AIDS salah satunya dengan meningkatkan sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud antara lain dukungan klinik dan ketersediaan obat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam rangka mendukung penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen sudah tersedia layanan kesehatan untuk HIV. Layanan kesehatan yang tersedia berupa laboratorium yang digunakan untuk keperluan tes HIV yang ada di setiap puskesmas. Alat-alat laboratorium itu sendiri berasal dari bantuan pemerintah pusat. Selain di puskesmas kegiatan tes HIV juga bisa dilakukan di rumah sakit yang ada di Kabupaten Kebumen. Untuk kegiatan pengobatan atau pengambilan obat dilakukan di klinik

VCT RSUD Kebumen. Di klinik VCT tersebut juga tersedia bantuan susu formula bagi bayi keluarga penderita yang membutuhkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen sudah didukung layanan kesehatan seperti laboratorium tes HIV maupun klinik pengobatan.

4.2 Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen

4.2.1 Komunikasi

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS menggunakan metode komunikasi melalui media massa dan secara langsung. Metode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat adalah melalui acara *talk show* di televisi, koran, website, media social dan tatap muka langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi. Hal ini menunjukkan komunikasi yang terjalin dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS sudah menggunakan metode yang jelas.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS muncul kendala pada penyampaian informasi kepada masyarakat. Kendala yang pertama, penyampaian informasi melalui media elektronik televisi tidak menjangkau seluruh masyarakat. Ketika informasi mengenai program penanggulangan HIV-AIDS di siarkan melalui televisi tidak semua masyarakat menyaksikan sehingga masyarakat tidak menerima informasi. Hal ini bisa disebabkan karena ketika acara ditayangkan masyarakat sedang bekerja

atau tidak ada di rumah. Penyebab lain bisa karena kualitas tayangan yang diterima masyarakat kurang baik atau televisi yang digunakan tidak dapat mengakses saluran televisi lokal karena banyak ditemui masyarakat yang dapat mengakses saluran televisi lokal tetapi tampilan yang diterima kurang baik.

Kedua, banyak masyarakat yang menggunakan akses internet untuk kegiatan hiburan. Sudah banyak masyarakat terutama anak muda yang sudah mengenal dan memiliki akses internet tetapi mereka menggunakannya untuk akses konten hiburan daripada konten berita atau informasi. Ketiga, ketika diadakan sosialisasi tidak semua warga masyarakat hadir. Ketidakhadiran masyarakat ini didasari berbagai macam alasan mulai dari bekerja, sakit, ada kegiatan lain sampai keinginan pribadi untuk tidak datang. Hal ini lah yang menjadi penyebab tidak meratanya informasi yang diterima masyarakat. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) adalah masih banyak masyarakat yang enggan melakukan tes HIV.

Berdasarkan fenomena komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, metode komunikasi menjadi faktor penghambat. Pemilihan metode komunikasi dengan menyampaikan informasi melalui media elektronik dan bertatap muka secara langsung melalui kegiatan sosialisasi dirasa sudah tepat. Namun pada kenyataannya, tidak semua informasi sampai ke masyarakat. Ini menandakan bahwa metode yang digunakan saat ini belum maksimal.

4.2.2 Sumber Daya

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam penentu keberhasilan. Tidak hanya kuantitas tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan agar didapatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait jumlah sumber daya yang terlibat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen diketahui jumlah sumber daya manusia dalam angka tidak pasti. Hal ini dikarenakan melibatkan partisipasi sumber daya manusia dari semua lini. Sebagai contoh Dinas Kesehatan sebagai anggota dibawah koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Di bawah Dinas Kesehatan masih ada rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan jumlah rumah sakit dan puskesmas menacapai puluhan. Ini hanya dari Dinas Kesehatan saja, belum termasuk anggota KPA lintas sektoral lain dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga tidak didapatkan jumlah yang pasti berapa sumber daya yang terlibat. Untuk sumber daya manusia yang berada di kantor sekretariat KPA berjumlah 4 orang. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, KPA membuat tim Bangga Aku Tahu (ABAT) yang dari empat yaitu instansi Dinas Kesehatan, bagian Kesra, Dikpora dan Kementrian Agama. Mereka dilatih untuk menyampaikan bagaimana HIV-AIDS kepada masing-masing anggotanya. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas implementor dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melaksanakan kebijakan publik dibutuhkan juga dukungan sumber daya finansial. Dukungan sumber daya finansial atau anggaran yang cukup akan memudahkan pelaksanaan kebijakan dalam menapai sasaran dan tujuan. Jika dukungan anggaran tidak mencukupi pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran dana dari APBD. Untuk KPA sendiri selain dana yang berasal dari APBD mereka juga mendapat dana dari *Global Fund* atau dana lain. *Global Fund* merupakan oraganisi internasional yang membantu memberikan bantuan dana dalam rangka mencegah persebaran dan penanganan berbagai penyakit menular seperti malaria, tbc dan HIV-AIDS. Baik KPA maupun Dinas Kesehatan mengatakan bahwa dana yang mereka terima sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan program penaggulangan HIV-AIDS di Kabupeten Kebumen. Hal ini menunjukkan tidak ada masalah dengan sumber daya finansial.

Untuk sumber daya fasilitas, berdasarkan hasil wawancara dalam penanggulangan HIV-AIDS sudah didukung dengan sumber daya fasilitas yang baik. Sumber daya fasiliats yang tersedia merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Sumber daya fasilitas tersebut berupa peralatan laboratorium untuk melakukan tes HIV. Bantuan alat laboratorium ini diberikan kepada seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen sehingga saat ini seluruh puskesmas sudah dapat melakukan tes HIV. Selain bantuan sumber daya fasilitas berupa alat laboratorium,

pemerintah pusat juga memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia di puskesmas untuk melakukan tes HIV kepada pasien dan menggunakan alat laboratorium. Selain puskesmas, RSUD Kebumen juga mendapatkan pelatihan untuk menangani ODHA ibu hamil saat perawatan dan melahirkan. ODHA ibu hamil memerlukan perawatan khusus bahkan ketika mereka merencanakan kehamilan. Dari tahap merencanakan kehamilan sampai dengan setelah melahirkan harus dalam pengawasan dokter. ODHA ibu hamil melahirkan menggunakan metode operasi yang harus dilakukan oleh dokter yang terlatih. Untuk bayi yang dilahirkan akan mendapat bantuan susu formula dari pemerintah lewat Kelompok Dukungan Sebaya (KDS).

Berdasarkan fenomena sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen bisa dikatakan sebagai faktor pendukung. Tidak ada kendala dalam sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia yang ada jumlahnya sudah mencukupi dan sumber daya manusia tersebut sudah mendapat pelatihan guna meningkatkan kompetensi. Untuk sumber daya finansial baik KPA maupun Dinas Kesehatan sudah merasa cukup dengan sumber daya finansial yang berasal dari APBD. Dana yang berasal dari APBD tersebut sudah memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program. Sedangkan untuk sumber daya fasilitas sudah tersedia alat laboratorium untuk tes HIV di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen.

4.2.3 Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memiliki komitmen yang cukup tinggi. Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik terkait penyakit HIV-AIDS yang ada di Kabupaten Kebumen.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) ikut terjun langsung. KPA ikut terjun langsung dalam kegiatan yang dilakukan sendiri oleh KPA maupun kegiatan yang dilakukan

bersama dengan anggota KPA lain. Tidak hanya itu, KPA juga melakukan pendampingan terhadap kader-kader yang masih belum terlalu paham dengan tugasnya dilapangan terutama untuk kader yang masih baru.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena disposisi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen merupakan faktor pendukung. Hal ini dilihat dari komitmen Komisi Penanggulangan AIDS dan anggotanya untuk mensukseskan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS. Selain itu KPA dan anggotanya selalu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang penting terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) telah menyusun struktur birokrasi yang baik. Struktur birokrasi dibuat untuk mempermudah pembagian tugas terhadap anggota KPA. Struktur birokrasi yang ada di KPA sudah jelas dan tidak terlalu panjang. Hal ini dapat memudahkan koordinasi KPA dengan para anggotanya. Selain itu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sudah membuat *standart operating procedures* (SOP). Dalam SOP tersebut sudah dijelaskan tugas, kegiatan sampai sasarannya. Dalam peksanaannya tidak ada masalah terkait dengan SOP.

Berdasarkan fenomena struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, struktur birokrasi bisa menjadi faktor pendorong. Struktur birokrasi menjadi faktor pendorong dilihat dari aspek *standart operating procedures* (SOP). dengan tidak adanya masalah dalam pelaksanaan SOP. Sedangkan dilihat dari aspek struktur birokrasi, struktur birokrasi yang ada sudah jelas dan tidak terlalu panjang sehingga memudahkan dalam koordinasi.